

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Di negara-negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang lengkap, kebutuhan terhadap informasi tentang keuangan merupakan suatu hal yang penting. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, pelaku bisnis maupun publik secara sukarela bersedia menyajikan informasi / atau laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan.

Namun sayangnya hingga saat ini, masih ada sebagian masyarakat kita yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja, sebab merekalah yang dapat memahami dan menterjemahkan angka-angka dalam laporan keuangan.

Sementara itu masyarakat pembaca laporan keuangan yang bukan berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka, padahal laporan keuangan sebenarnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna laporan dari berbagai latar belakang.

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit atau membingungkan pembaca tetapi justru membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas. Laporan keuangan disampaikan (dipublikasikan) tidak lebih seperti berita atau informasi di media massa, sehingga pembaca laporan keuangan pada dasarnya tidaklah lebih sulit dibandingkan membaca berita-berita lain yang dimuat di koran, majalah, atau tabloid.

Laporan keuangan ini memang bukan satu satunya informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat informasi selain akuntansi yang juga sangat membantu, seperti laporan statistik, berita di media masa, hasil penelitian , dan sebagainya. Namun keberadaan informasi keuangan tidak dapat di abaikan begitu saja karena tanpa informasi keuangan tersebut keputusan yang di ambil menjadi kurang berkualitas.

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah "amanah" yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggung jawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan, namun perlu juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai

Penyajian laporan keuangan adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian , tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemah nya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi. Maka untuk mengikis korupsi tersebut, salah satu caranya adalah dengan membudayakan akuntabilitas yang juga berarti membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar.

Pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat baik langsung seperti dalam pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan, maupun tidak langsung

melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian fasilitasi bagi pelaksana pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh Keuntungan Komperatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektor yang sama secara nasional. Berbagai usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura baik secara aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan atas permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan magang di Dinas tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana dinas pertanian tersebut mengelola laporan keuangannya.

Oleh karena itu, proposal magang ini diberi judul **“ANALISA KINERJA LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013-2014”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dari proposal magang ini adalah :

1. Bagaimana melakukan analisis laporan keuangan.

2. Laporan keuangan yang sudah dianalisis dapat memberikan gambaran bagaimana laporan keuangan tersebut, apakah laporan tersebut sudah disajikan secara benar, atau perlu ada perbaikan dari laporan keuangan itu sendiri..
3. Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka menciptakan *good governance*.
4. Hasil dari analisis laporan keuangan yang di sajikan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

1.3. Tujuan Magang

Tujuan magang secara garis besar adalah:

- Untuk melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas .
- Untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dengan terjun langsung ke dunia kerja.
- Untuk mengetahui pentingnya laporan keuangan serta dampak atas laporan keuangan tersebut yang dilakukan di DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Untuk dapat memberikan perbansingan atas terlaksananya teori-teori yang dipelajari dibangku perkuliahan dengan realita di dunia kerja.

1.4. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang pada DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT ADALAH:

- Penulis dapat memahami analisa laporan keuangan yang terdapat pada DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Menambah ilmu pengetahuan penulis karena terdapat beberapa perbedaan pada dunia kerja dengan teori-teori yang dipelajari di bangku perkuliahan.
- Memberikan gambaran secara nyata tentang dunia kerja saat ini dan dapat menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri penulis.
- Hasil dari magang ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan dan tambahan pemikiran bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul dan materi yang akan dibahas, penulisan laporan keuangan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sistematika laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan pendahuluan dari keseluruhan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori yang terdiri dari Pengertian analisa laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, jenis jenis laporan keuangan

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Tanaan Pangan. Uraian ini berisi tentang sejarah instansi, dan struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama magang yaitu menguraikan tentang analisa laporan keuangan dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Suatera Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan magang di dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian laporan keuangan

“Laporan keuangan adalah informasi yang di sajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan social politik dan ekonomi sehingga keputusa yang diambil dapat berkualitas.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:1), laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Munawir (2011:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Sedangkan menurut Harahap (2010:105), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas public dalam rangka menciptakan *good governance*.

Tidak semua orang bias membaca laporan keuangan, untuk menterjemah informasi dalam bentuk laporan keuangan tersebut perlu di bantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksud untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan , bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagai mana mengevaluasi laporan tersebut.

2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat

apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

2.3.1 Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2.3.2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain..Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu.

2.3.3. Keandalan

Informasi juga harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

2.3.4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.4. Keterbatasan Laporan Keuangan

keterbatasan laporan keuangan antara lain:

2.4.1 Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan *interim report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final.

2.4.2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah.

2.4.3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan. Pencatatan transaksi berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat perintah pembayaran (SPP) yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / atau kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan kantor, Surat Perintah Membayar yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / atau kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang berasal dari DIPA, Surat

Perintah Pencairan Dana yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / atau kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang berasal dari KPPN.

2.5. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:2), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan realisasi anggaran

2.5.1. Neraca

Neraca terdiri dari:

2.5.1.1. Aset lancar

Aset lancar meliputi:

1. Kas dan setara kas
 - Kas di Rekening Kas Bendahara Umum Daerah (di BUD).
 - Kas Di Bendahara Pengeluaran.
 - Kas Di Bendahara Penerimaan.
2. Investasi jangka pendek
 - Deposito jangka waktu tak lebih dari 12 bulan
 - Wesel jangka pendek
 - Surat berharga saham untuk diperjual-belian
3. Piutang
 - Piutang pajak
 - Piutang retribusi
 - Piutang denda
 - Bagian lancar tagihan penjualan angsuran
 - Bagian lancar tuntutan perbendaharaan

- Bagian lancar tuntutan ganti rugi
- Piutang lainnya

4. Persediaan

- Barang habis pakai kantor
- Barang tak habis pakai kantor
- Obat-obatan
- Mesin dan peralatan untuk bantuan masyarakat
- Tanaman dan hewan untuk bantuan masyarakat.

2.5.1.2. Kewajiban;

Kewajiban meliputi:

1. Kewajiban jangka pendek, meliputi:

- Utang transfer
- Utang gaji kepada pegawai
- Utang bank
- Obligasi pemerintah daerah yang jatuh tempo
- Bagian lancar utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
- Bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan

Bank

- Bagian lancar utang jangka panjang lainnya
- Utang jangka panjang lainnya.

2. Kewajiban jangka panjang, meliputi:

- Utang jangka panjang kepada Pemerintah Pusat
- Utang jangka panjang kepada Pemerintah Daerah

- Utang jangka panjang kepada Lembaga Keuangan Bank
- Utang jangka panjang kepada Lembaga Keuangan non Bank
- Obligasi pemerintah daerah
- Utang jangka panjang lainnya.

2.5.1.3 Ekuitas Dana lancar

Ekuitas dana lancar meliputi:

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- Pendapatan ditangguhkan
- Cadangan Piutang
- Cadangan Persediaan
- Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

2.5.1.4 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi, meliputi:

- Dana yang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
- Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap
- Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
- Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

2.5.1.5 Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan, meliputi:

- Dana diinvestasikan dalam Dana Cadangan Pembangunan Infrastruktur

- Dana diinvestasikan dalam Dana Cadangan Infestasi Permanen

2.5.2. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran terdiri atas empat elemen (pos) utama, yaitu:

2.5.2.1. Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas :

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer meliputi:

2.1. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum

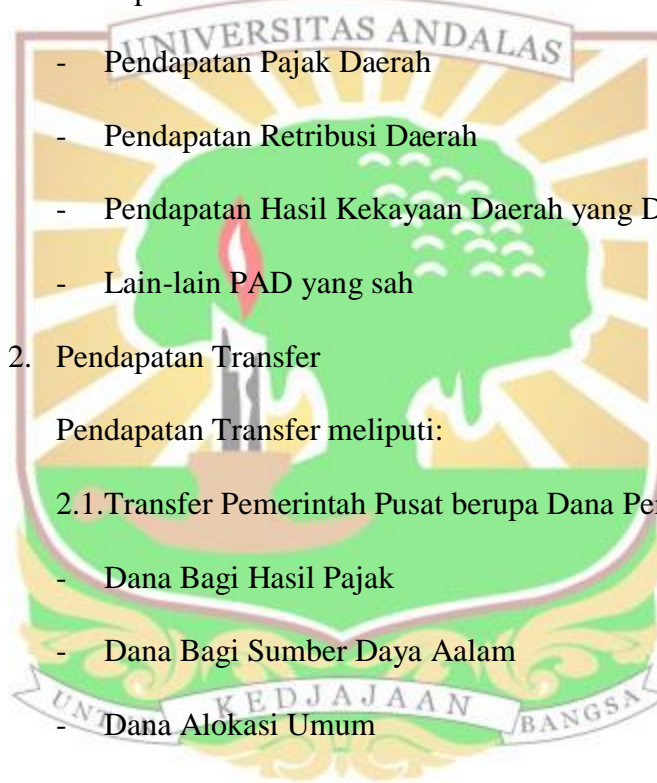
- Dana Alokasi Khusus

2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Dana Otonomi Khusus
- Dana Penyesuaian

3.3. Transfer Pemerintah Provinsi (khusus untuk pemerintah kota)

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak



- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

3.4.Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Pendapatan hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya.

2.5.2.2. Belanja

Belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan Spaiial

2. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi:

- Belanja Tanah
- Belanja Peralatan Mesin
- Belanja Gedung dan Bangunan
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Belanja Aset Tetap Lainnya
- Belanja Aset Lainnya



3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin.

Belanja Tak Terduga meliputi:

- Bantuan Bencana Alam
- Bantuan sosial
- Bantuan Korban Politik

2.5.2.3. Transfer

Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi transfer berupa Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ kota, meliputi:

- Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota
- Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota

Untuk pemerintah kabupaten/ kota pengeluaran transfer berupa Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan ke Desa, meliputi:

- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil Retribusi
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya



2.5.2.4.Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/ defisit. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

2.5.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1) penerimaan pembiayaan, 2) pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- Penggunaan SILPA tahun lalu
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
- Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank
- Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
- Pinjaman Dalam Negeri – Pengeluaran Obligasi Pemerintah Daerah
- Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah lainnya

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pemerintah Pusat
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
- Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Negara
- Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
- Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya



2.5.2.6 SILPA/SIKPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SILPA/SIKPA dapat dihitung dari nilai pada pos Surplus/Defisit ditambah dengan pos pembiayaan neto.

2.5.3. Elemen laporan arus kas

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama, yaitu: 1) arus kas dari aktifitas operasi, 2) arus kas dari aktifitas investasi, 3) arus kas dari aktivitas pembiayaan, 4) arus kas dari aktivitas non anggaran.

2.5.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi meliputi:

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Penyesuaian
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Lainnya
- Dana Hibah
- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat

Arus kas keluar dari aktivitas operasi antara lain:

- Belanja Pegawai



- Belanja Barang
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan Sosial
- Belanja Tak Terduga
- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil Retribusi
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

2.5.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi meliputi:

- Pendapatan Penjualan Aset Tetap - Tanah
- Pendapatan Penjualan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
- Pendapatan Penjualan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
- Pendapatan Penjualan Aset Tetap – Jalan, Gedung, Jaringan
- Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya
- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi;

- Belanja Modal- Tanah
- Belanja Modal – Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal – Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan jaringan
- Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

- Belanja Modal – Aset Lainnya

2.5.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan meliputi:

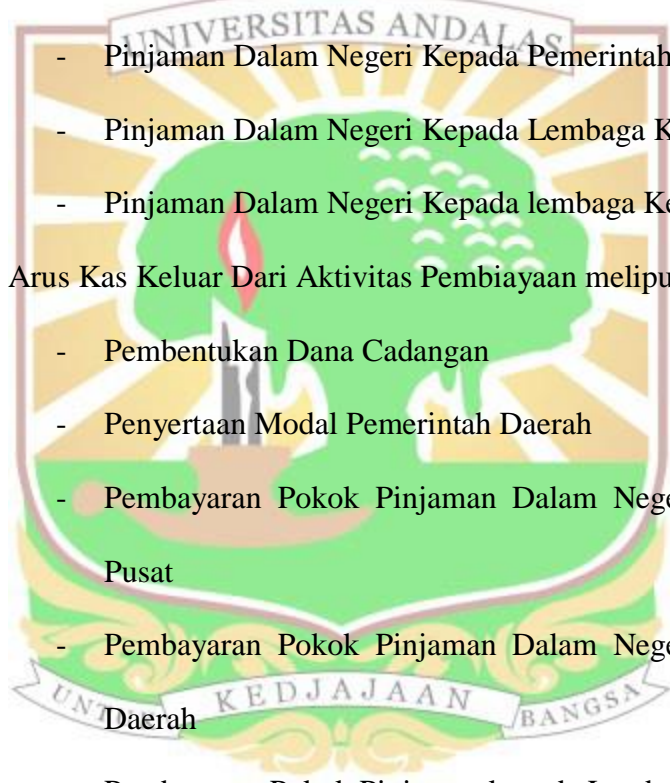
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Divestasi)
- Penerimaan Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah
- Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Pusat
- Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan Bank
- Pinjaman Dalam Negeri Kepada lembaga Keuangan bukan Bank

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pembiayaan meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

2.5.3.4. Arus Kas dari Aktivitas NonAnggaran

Arus Kas Masuk dari Aktivitas NonAnggaran meliputi:



- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
- Kiriman Uang Masuk (Mutasi Kas Antar-Rekening Kas Umum Daerah)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas NonAnggaran meliputi:

- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
- Kiriman Uang Masuk

2.5.4. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

2.5.4.1. Tujuan Penyajian atas Laporan Keuangan

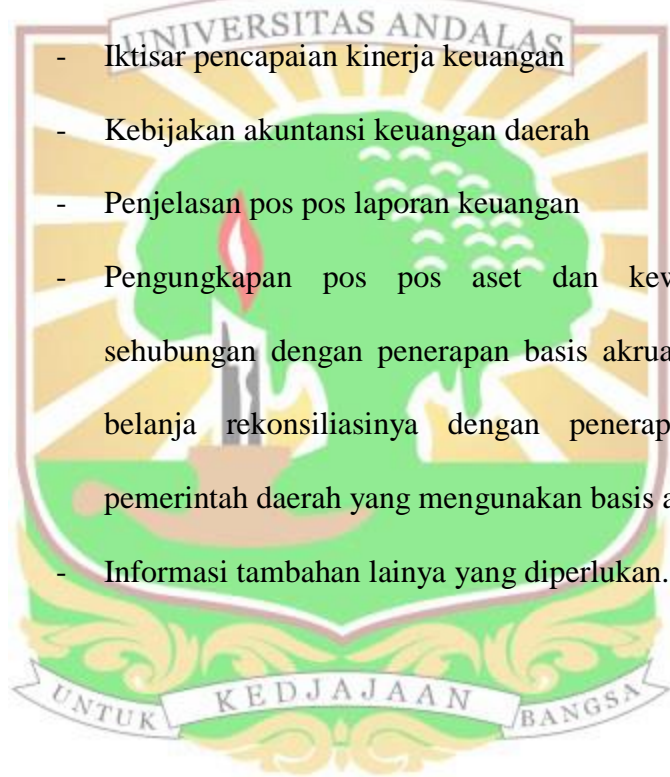
Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud antara lain untuk:

- Menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak penyaji dengan pengguna laporan mengenai informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan.
- Melengkapi informasi dalam laporan keuangan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas yang bersifat garis besar, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi pengguna laporan.
- Mengungkapkan informasi penting yang berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik.

2.5.4.2. Elemen Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk dari mpengungkapan oleh pemerintah. Seberapa luas pengungkapan informasi tersebut sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah daerah. Namun sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah, pengungkapan informasi dalam Catatan atas laporan keuangan tersebut sekurang kurangnya meliputi:

- Kebijakan fidkal / keuangan daerah, ekonomi makro daerah, pencapaian target APBD.



- Iktisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan akuntansi keuangan daerah
- Penjelasan pos pos laporan keuangan
- Pengungkapan pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual.
- Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.